



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LKIP 2021 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LKIP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

20 21

Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik
Setko Administrasi Jakarta Pusat
Email: tatalaksana.jakpus@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

1 PENDAHULUAN

- 1** Latar Belakang
- 2** Maksud dan Tujuan
- 2** Gambaran Umum Wilayah
- 4** Gambaran Umum Organisasi
- 10** Isu Strategis
- 12** Sistematika Penyusunan

2 PERENCANAAN KINERJA

- 15** Rencana Strategis
- 16** Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2021
- 22** Rencana Kerja 2021

3 AKUNTABILITAS KINERJA

- 22** Akuntabilitas Capaian Kinerja
- 91** Akuntabilitas Keuangan
- 99** Prestasi

4 PENUTUP

- 101** Kesimpulan
- 101** Saran

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum LKIP merupakan dokumen informasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam perencanaan dan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta secara umum serta kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat secara khusus, yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya.

Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dalam merealisasikan target kinerja kota. Hendaknya kita semua dapat terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang dengan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik.

Akhir kata, kepada semua pihak yang berkepentingan dalam tersusunnya laporan ini, kami mengharapkan adanya masukan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat ke depan.

Jakarta, 31 Januari 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tersusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022 merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan visi “Jakarta Maju, Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”, serta beberapa misi untuk pencapaian visi di atas, yaitu:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan social, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Untuk merealisasikan amanah Peraturan Daerah tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan misi “menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas”, dengan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, telah diamanatkan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sasaran strategis, khusus dan operasional yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat. Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Sasaran Strategis					
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85	N/A	N/A
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	86	91.63	106.55%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91%	96.24%	105.76%

Tabel Sasaran Strategis, Khusus dan Operasional dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kemudian kinerja tambahan Walikota pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	100%	100%	100%
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	100%	100%

		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	100%	100%	100%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	100%	100%	100%
Sasaran Khusus					
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	3	100%
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	81*	100%
Sasaran Operasional					
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99.99%	99.99%
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	93	90.66	97.48%

16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%
----	---	---	------	------	------

*Nilai berdasarkan perolehan nilai dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, bukan hasil penilaian Kemenpan RB RI

Tabel Sasaran Strategis, Khusus dan Operasional dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Rata-rata capaian tidak bisa didapatkan karena masih ada sasaran yang belum mendapatkan nilai/ realisasi, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang penilaiannya masih berproses di Kemenpan RB.

Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami APBD perubahan sehingga pagu anggaran awal, anggaran perubahan, dan realisasi program menjadi:

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	349,943,077,401	300,897,751,889	94,012,545,607	97.71%
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8,927,009,886	8,277,551,038	6,122,581,724	73.97%
3	Program Pengelolaan Kecamatan	144,250,578,462	142,617,291,543	40,959,855,870	98.84%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51,541,070,696	41,512,088,258	35,357,022,827	85.17%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,077,018,692	2,004,294,822	1,960,466,380	97.81%
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190,271,555,947	188,123,581,792	183,835,142,488	97.72%
		747,010,311,084*	683,432,559,342*	662,247,614,896*	91.87%**

*=jumlah

**=rata-rata

Secara keseluruhan seluruh target kinerja Kepala Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target di Tahun 2021, kecuali Indeks Reformasi Birokrasi (proses penilaian belum selesai), penyelesaian pengaduan masyarakat (capaian 99,9%), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKLM) dengan capaian 97,48%.

Persentase pemanfaatan e-Order diberikan pengecualian karena anggaran Tahun 2021 yang terkena refocusing, adanya pembatasan sosial, dan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan sebelum e-Order ditetapkan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan semangat reformasi penyelenggaraan tata kelola, setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Terwujudnya suatu *good governance* dalam praktik pemerintahan dan kenegaraan adalah harapan semua pihak.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* dimaksud, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota-kota besar hampir di seluruh dunia. Komitmen tersebut tertuang dalam TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Di samping itu dinyatakan pula bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan

tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan kesadaran ini, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban setiap kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat harus dilakukan secara benar, jelas, dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat di tahun 2021. Tujuannya adalah, sebagai berikut:

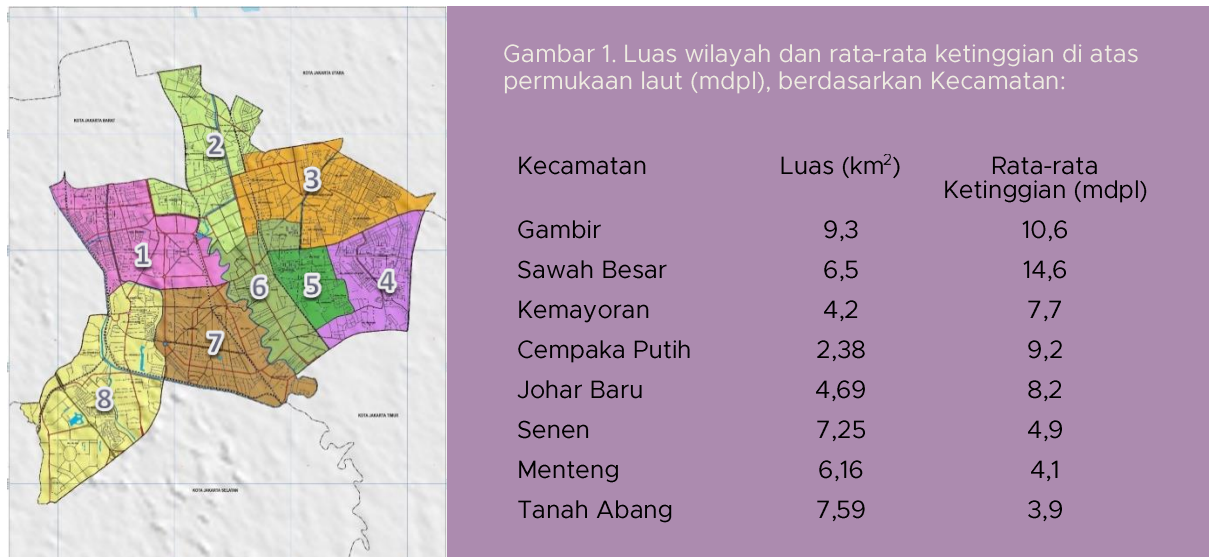
- 1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2021;
- 2) Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di masa yang akan datang;
- 3) Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

Gambaran Umum Wilayah

Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah kota administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106° 58' 18" BT dan 5° 19' 12" LS sampai dengan 6° 23' 54" LS, dengan perbatasan wilayah :

- ✚ Arah utara berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat (Jalan Sunter Raya, Jalan Taman Sari, dan Jalan Zainul Arifin);

- ✚ Arah selatan berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jalan Jenderal Sudirman, Kali Banjir Kanal, Kali Ciliwung, dan Jalan Pramuka);
- ✚ Arah barat berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (Jalan KS Tubun dan Kali Grogol);
- ✚ Arah timur berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Timur (bypass Jalan Jenderal Achmad Yani).



Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas wilayah 48,13 km² dengan rata-rata ketinggian 7,9 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar terdiri dari tanah daratan relatif landau dengan belahan kontur yang tinggi di sepanjang Kali Banjir Kanal. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dibagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan, 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) Rukun Warga/RW, dan 4.700 (empat ribu tujuh ratus) Rukun Tetangga/RT.

Berdasarkan data penduduk konsolidasi DDN Desember 2019 (Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat), jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 1.148.447 jiwa, yang terdiri dari 578.430 berjenis kelamin laki-laki dan 570.017 penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk dengan status Warga Negara Asing (WNA) tercatat sebanyak 729 jiwa, 171 berjenis kelamin laki-laki dan 89 berjenis kelamin perempuan.

Tingkat kepadatan penduduk per Juni 2020 sebesar 23.927,57 jiwa/km², mengalami kenaikan dibandingkan tingkat kepadatan penduduk menurut data Tahun 2018 yaitu 23.820 jiwa/km². Berdasarkan kecamatan, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Johar Baru, 61.405,97 jiwa/km² dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Gambir, 13.273,51 jiwa/km².

Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, ada istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

Gambaran Umum Organisasi

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki posisi strategis sebagai lokasi pusat pemerintahan kota Jakarta, Istana Negara, kantor-kantor Lembaga Tinggi Negara, kantor-kantor Duta Besar dari berbagai Negara, serta beberapa kawasan bisnis yang menjadi barometer perekonomian di Indonesia. Dengan posisi tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki tanggung jawab yang besar baik sebagai pendukung Provinsi DKI Jakarta maupun dalam peta nasional dan internasional, sehingga mempunyai konsekuensi kewenangan maupun kewajiban khusus yang berbeda dibandingkan kota/ kabupaten lainnya baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, tertera bahwa Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Wakil Walikota, dan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi bahwa Kota Administrasi Kota

Administrasi bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan huku, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/asset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- r. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, terdiri dari:

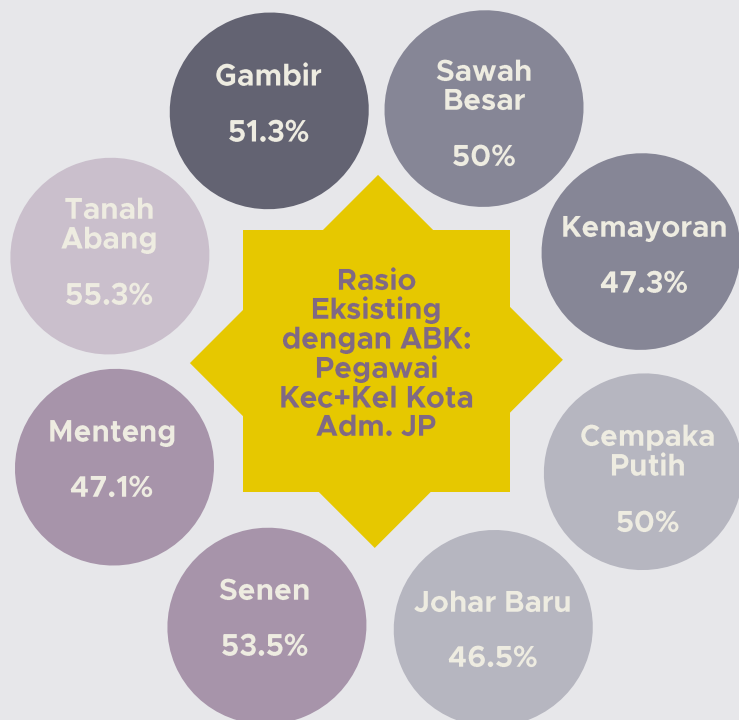
- 1) Walikota;
- 2) Wakil Walikota;
- 3) Sekretariat Kota (dipimpin oleh Sekretaris Kota);
 - a. Asisten Pemerintahan, dengan bagian-bagian di bawahnya:
 - i. Bagian Pemerintahan;
 - ii. Bagian Hukum;
 - iii. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dengan bagian-bagian di bawahnya:
 - i. Bagian Perekonomian;
 - ii. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, dengan bagian-bagian di bawahnya:
 - i. Bagian Umum dan Protokol;
 - ii. Bagian Keuangan;
 - iii. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Wakil Camat;
 - c. Sekretariat Kecamatan (dipimpin Sekretaris Kecamatan), terdiri atas:
 - i. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Subbagian Program dan Anggaran;
 - iii. Subbagian Keuangan;
 - iv. Seksi Pemerintahan;
 - v. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - vi. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Kelurahan, terdiri atas:
 - i. Sekretariat Kelurahan (dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan);
 - ii. Seksi Pemerintahan;
 - iii. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - iv. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Rasio perbandingan ABK dengan jumlah eksisting pegawai di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan ABK dengan jumlah eksisting pegawai di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Rasio Eksisting dengan ABK Pegawai Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat (sumber Bagian KKPP Setko Adm. Jakarta Pusat, 2022)

Gambar 3. Rasio Eksisting dengan ABK Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber Bagian KKPP Setko Adm. Jakarta Pusat, 2022)



UKPD bidang pemerintahan tingkat Kota Administrasi, meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Inspektorat Pembantu Kota Adm	21
2	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	15
3	Suku Badan Kepegawaian Kota Adm	16
4	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm	14
5	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm	45
6	Suku Dinas Penggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm	418
7	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm	16
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm	473
9	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm	160

Tabel 1. Jumlah Pegawai PD/UKPD di bawah bidang Pemerintahan (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat, 2022)

UKPD bidang Perekonomian tingkat Kota Administrasi, meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm	31
2	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatis Kota Adm	17
3	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm	65
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm	23
5	Suku Dinas Perhubungan Kota Adm	138

Tabel 2. Jumlah Pegawai PD/UKPD di bawah bidang Perekonomian (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat, 2022)

UKPD bidang Pembangunan tingkat Kota Administrasi, meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Suku Dinas Bina Marga Kota Adm	52
2	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm	59
3	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Adm	14
4	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm	66
5	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Adm	40
6	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm	69

Tabel 3. Jumlah Pegawai PD/UKPD di bawah bidang Pembangunan (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat, 2022)

UKPD bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Suku Dinas Sosial Kota Adm	36
2	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm	131
3	Suku Dinas Kesehatan Kota Adm (+Paramedis)	656
4	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm	31
5	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm	45
6	Suku Dinas Kebudayaan Kota Adm	14
7	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Adm	20

Tabel 4. Jumlah Pegawai PD/UKPD di bawah bidang Kesejahteraan Rakyat (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat, 2022)

UKPD bidang Administrasi, meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm	15
2	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Adm	20
3	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Adm	28
4	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Adm (+unit pelayanan)	124

Tabel 5. Jumlah Pegawai PD/UKPD di bawah bidang Administrasi (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat, 2022)

ISU STRATEGIS

Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi menetapkan bahwa Kota Administrasi bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Sebagai implementasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat demi rangka mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dari penelaahan visi misi kepala daerah, permasalahan pelayanan, dan arah kebijakan kewilayahan berdasarkan RPJMD 2017-2022, beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu strategis adalah:

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	2	3	4
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKMD	Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT/RW, dan LMK, FKMD	1. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	Pengembangan Kewilayahan	Masih perlu dioptimalkan sarana dan prasarana kewilayahan dalam menunjang pelayanan prima kepada masyarakat	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat	Masih perlu dioptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan	2. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	2	3	4
4	Pemberdayaan masyarakat	Masih perlu dioptimalkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan masyarakat	
5	Ekonomi masyarakat	Masih perlu dioptimalkan pengembangan peluang usaha ekonomi dan pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi	
6	Penanganan Bencana	Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial)	3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Pusat
7	Penataan Kawasan	Masih perlu dioptimalkan koordinasi bersama seluruh mitra kerja terkait penataan kawasan	

Tabel 6. Dasar Penetapan Isu Strategis (Sumber: Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022)

Dengan begitu, peningkatan kualitas pelayanan, kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat, dan penataan pratana sosial, serta mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder menjadi isu strategis yang dikedepankan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rencana strategis 2017-2022.

Selain tiga isu strategis tersebut, di Tahun 2021 Pemerintah Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada khususnya masih melanjutkan upaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat di tengah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pola pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat pun diubah dengan menggunakan pola baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Layanan konvensional dibatasi dan anggaran perencanaan semula harus dirombak berdasarkan skala prioritas baru. Selain itu, keuangan Pemerintah yang belum stabil juga memengaruhi pencairan anggaran yang sudah direncanakan dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal tersebut berdampak pada pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di tahun yang sama.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021, terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

b. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

c. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Prestasi

d. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Visi : Jakarta Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan bagi Semua.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan 5 (lima) misi pembangunan daerah, antara lain :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinekaan.

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022 sinkron dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Perubahan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 otomatis memengaruhi perubahan pada Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017-2022

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban misi 3, yaitu Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Renstra 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk menciptakan Jakarta sebagai Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	- (80)	3 (83)	3 (86)	4 (88)	4 (88.5)

Catatan: Pada RPJMD target Indeks Kepuasan Masyarakat dalam jangka waktu 5 tahun menggunakan nilai konversi IKM (skala 1-100) yaitu 80, 83, 86, 88, dan 88,5; sementara pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat target dimulai dari tahun kedua dan menggunakan indeks (skala 1-4): tidak ada target, 3,3,4, dan 4 di tahun kelima.

Dengan dilaksanakannya evaluasi berkelanjutan RPJMD Provinsi DKI Jakarta serta Renstra seluruh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dikaji dan kemudian dilakukan perubahan.

Pada evaluasi SAKIP Tahun 2021 Kemenpan RB merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah di dalamnya menggunakan perubahan perencanaan yang telah disusun, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi:

- Indeks Reformasi Birokrasi (berdasarkan draft RPJMD perubahan)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (Tetap)
- Persentase Kualitas Penggunaan Anggaran (Perkin setara sasaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	86
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91%

Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, dan hasil evaluasi di tingkat provinsi, maka telah dipilih 3 indikator kinerja utama, cascading dan non-cascading, yang ditetapkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai indikator utama yang bersinergi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2021, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat diberi amanah 3 (tiga) indikator kinerja utama yang terdiri dari Indeks Reformasi Birokrasi yang dijadikan indikator tujuan berdasarkan hasil evaluasi dan draft RPJM perubahan, indeks kepuasan masyarakat yang merupakan indikator sasaran, dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang diambil dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan merupakan indikator kinerja utama non-cascading (Perkin setara sasaran).

Sehingga Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2021 menjadi:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	86
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Selain tiga sasaran di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan amanah tambahan sebagai kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Sasaran Strategis, yang terdiri dari Sasaran Utama pada tabel 9 di atas dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional, sehingga secara lengkap Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Sasaran Strategis			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	86
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (KSD 20)	100%
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD 29)	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (KSD 73)	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (KSD 38)	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (KSD 39)	100%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (KSD 61)	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (KSD 63)	100%
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (KSD 66)	100%
Sasaran Khusus			
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Jakarta.	
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)
Sasaran Operasional			
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	93
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Penjelasan singkat mengenai Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat:

- ❖ Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) didapat dari Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- ❖ Penilaian Reformasi Birokrasi digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam penilaian digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen penguangkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Sub komponen Aspek Pemenuhan dan Aspek Reformasi terdiri dari, antara lain:

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi Kebijakan
- Penataan dan Penguatan Organisasi
- Penataan Tatalaksana

- Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Penguatan Akuntabilitas
 - Penguatan Pengawasan
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan
- ❖ Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:
- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
 - b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
 - c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$$
 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$
 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$
- ❖ Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta terangkum dalam Panca Upaya Utama, baik yang merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Nasional maupun kegiatan yang mendukung pencapaian Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2017-2022. Panca Upaya Utama merupakan formulai dalam rangka mewujudkan Jakarta yang

“Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, yang memiliki 5 upaya utama, yaitu: Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Peningkatan Integritas Aparatur, Pembangunan Kota Lestar, dan Pengembangan Jakarta sebagai simpul kemajuan. KSD yang diamanatkan kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 adalah :

1. KSD 20, Sasaran meningkatnya kewirausahaan baru;
 2. KSD 29 dan 73, sasaran terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta;
 3. KSD 38 dan 39, sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
 4. KSD 61 dan 63, sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi;
 5. KSD 66, sasaran meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.
- ❖ Pemanfaatan e-Order adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu pengembangan wirausaha di Jakarta dan peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan mengembangkan online market yang dapat digunakan Perangkat Daerah dalam memenuhi keperluan penyediaan khususnya makan minum rapat.
 - ❖ Opini Laporan Keuangan Daerah adalah Pernyataan professional Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.
 - ❖ Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk program umum dan unggulan perangkat daerah diperlukan untuk memastikan tersampainya informasi terkait kepada masyarakat.
 - ❖ SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP seperti yang dijabarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya.

- ❖ Tindak lanjut arahan Gubernur adalah penugasan dari Gubernur ke Perangkat Daerah terkait untuk menyelesaikan isu saat itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- ❖ Pengaduan Masyarakat, pengawasan kinerja pemerintah melalui beberapa kanal yang diintegrasikan dengan sistem CRM atau Citizen Relation Management.
- ❖ Survey Kepuasan Masyarakat adalah Survey yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Survey ini agar dibedakan dengan Sasaran Strategis Walikota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.
- ❖ Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah tugas penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI kepada setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Selain IKU di atas yang menjadi bagian dari Sasaran Strategis, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Walikota juga mengampu target kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sasaran khusus, dan sasaran operasional.

Berikut adalah Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi yang sudah direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2021. Pada pelaksanaannya hanya kegiatan yang berkaitan dengan PPSU dan Tibum yang masih dilaksanakan sesuai anggaran.

Keterangan Covid-19 menandakan bahwa kegiatan tersebut masuk dalam indikator IKM yang dihapus, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut bersifat terbatas atau tidak dilaksanakan sama sekali, mengikuti anggaran yang tersedia.

INDIKATOR 1: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Tingkat Kota

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	86	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Koordinasi pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	laporan		
					Pemantauan Pengelolaan Penanganan Sarana Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan Kota Adm. Jakarta Pusat Tahun 2020	Terlaksananya pemantauan PPSU Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	laporan		
					Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Administrasi Jakarta Pusat	laporan		
					Koordinasi kegiatan lomba PKK tingkat Provinsi	Terlaksananya koordinasi kegiatan lomba PKK tingkat Provinsi	laporan		Pandemi Covid-19, indikator PKK tidak dimasukkan ke dalam penilaian IKM
					Monitoring kegiatan RPTRA	Terlaksananya monitoring kegiatan RPTRA	laporan		Pandemi Covid-19, indikator RPTRA tidak dimasukkan ke dalam penilaian IKM
					Monitoring kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	Terpantaunya pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PSN	laporan		Pandemi Covid-19, indikator Jumentik tidak dimasukkan ke dalam penilaian IKM
					Koordinasi penguatan kinerja Kader JUMANTIK	Terlaksananya koordinasi penguatan kinerja Kader JUMANTIK	laporan		Pandemi Covid-19, indikator Jumentik tidak dimasukkan ke dalam penilaian IKM
					Sinkronisasi Pokjanal POSYANDU	Terlaksananya sinkronisasi Penguatan Pokjanal POSYANDU	laporan		Pandemi Covid-19, indikator POSYANDU tidak dimasukkan ke dalam penilaian IKM

Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
1	Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm JP	Biro ORB, UP Statistik Diskominfotik, Satpol PP Kota Adm JP, Sudin PPAPP Kota Adm JP, Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Bagian Pemerintahan Setko Adm JP, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP, TP PKK Kota Adm JP, Kecamatan Kota Adm, JP, Kelurahan Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat \geq 86	Laporan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	
2	Pemantauan pelaksanaan pelayanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk Kelurahan) pada program PPSU dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bagian Pemerintahan Setko Adm. JP	Inspektur Pembantu Kota Adm JP, Sudin LH Kota Adm JP, Sudin Bina Marga Kota Adm JP, Sudin Sumber Daya Air Kota Adm JP, Sudin Kehutanan Kota Adm JP, Bagian Hukum Setko Adm JP, Bagian KKPP Setko Adm. JP, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Persentase tindak lanjut penyelesaian PPSU	Laporan hasil pemantauan	100%	
3	Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bagian Pemerintahan Setko Adm. JP	Satpol PP, Kesbangpol Kota Adm JP, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Administrasi Jakarta Pusat	Laporan	100%	
4	Koordinasi kegiatan lomba PKK tingkat Provinsi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin PPAPP Kota Adm JP, PKK Tingkat Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya koordinasi lomba PKK Tingkat Provinsi	Laporan	100%	Covid-19
5	Monitoring kegiatan RPTRA	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin PPAPP Kota Adm JP, PKK Tingkat Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya Monitoring kegiatan RPTRA	Laporan	100%	Covid-19
6	Monitoring kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terpantaunya pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PSN	Laporan	100%	Covid-19
7	Koordinasi penguatan kinerja Kader JUMANTI	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya koordinasi penguatan kinerja Kader JUMANTI	Laporan	100%	Covid-19
8	Sinkronisasi Pokjanel POSYANDU	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya sinkronisasi Penguatan Pokjanel POSYANDU	Laporan	100%	Covid-19

					Kecamatan	Ketertiban Umum			
					Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12 Laporan		Covid-19

Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
1	Koordinasi pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bagian KKPP Setko Adm JP, Muspika, DMI dan MUI, Kelurahan Kota Adm JP, PKK Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm JP, LMK, FKDM, Karang Taruna, UP Statistik Diskominfotik	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	Laporan agregat pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	
2	Koordinasi dengan Muspika dan FKDM	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Muspika, FKDM	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika dan FKDM	Laporan	100	
3	Koordinasi bersama Muspika dan lintas sector terkait di lingkungan Kecamatan	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan, Muspika, Satpol PP, FKDM	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengawasan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	Laporan	100	
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan PKK di tingkat Kelurahan seKecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan, TPKK Kecamatan, TPKK Kelurahan, Kader penunjang kegiatan PKK	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya 10 program pokok PKK	Laporan	100	Covid-19

Rencana Aksi (Renaksi)

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Terlaksananya pengukuran Kepuasan	86	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Bag KKPP Setko Adm JP													Notulen rapat		Koordinasi Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap	

pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat		Koordinasi teknis pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dengan Muspika, MUI, DMI, PKK, Karang Taruna, FKDM dan Lurah																	Pelayanan Publik tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			Koordinasi teknis pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kelurahan																			
			Pelaksanaan survey/pengumpulan data di Kecamatan																			
			Pengolahan penyajian Laporan agregat hasil SKM di tingkat Kecamatan																			
	Terlaksananya pendeteksian dini permasalahan wilayah	100	Persiapan, penyusunan KAK, HPS																KAK, HPS	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan		
			Penyusunan rencana kerja FKDM																			
			Pembuatan jadwal dan pembagian daerah kerja bagi anggota FKDM Kecamatan																			
			Rapat Koordinasi Internal																		Notulen rapat	
			Rapat koordinasi dengan 3 pilar serta sector terkait																		Notulen rapat	
			Laporan																		Laporan bulanan kegiatan FKDM	
	Terlaksananya pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	100	Persiapan, penyusunan KAK, HPS																KAK, HPS	Penyelenggaraan ketertiban umum tingkat kecamatan		
			Penyusunan jadwal rencana penertiban																Jadwal penertiban			
			Koordinasi bersama Muspika dan lintas sector terkait																		Notulen rapat	
			Kegiatan penertiban (pra dan pasca)																		Dokumentasi	
			Laporan kegiatan																		Laporan	
Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	100	Persiapan, penyusunan KAK, HPS																KAK, HPS	Pemberdayaan masyarakat melalui	Covid-19		

				Rapat Koordinasi dengan Kelurahan dan TPKK Kecamatan dan TPKK Kelurahan														Notulen rapat		gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kecamatan
				Penyusunan jadwal rencana kegiatan														Jadwal rencana		
				Gelar Kreativitas Forum Anak														Laporan kegiatan		
				Pertin PKK														Laporan pelaksanaan dan dokumentasi		
				Lomba di RPTRA														Laporan		
				Peningkatan SDM pengurus PKK														Laporan kegiatan		
				Pengajian PKK														Laporan kegiatan		
				Kegiatan 10 Proram Pokok PKK														Laporan kegiatan		
				Laporan kegiatan														Laporan kegiatan bulanan		

Tingkat Kelurahan

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	86	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Adm JP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86		
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pendeteksian dini permasalahan wilayah	Laporan		
					Peningkatan Peran kelembagaan RT, RT, dan LMK tingkat Kelurahan	Terselenggaranya pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Laporan		
				Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Adm JP	Terlaksananya pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Laporan		
					Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di Kota Adm JP	Terselenggaranya kegiatan 10 program pokok PKK	Laporan		
					Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan di Kota Adm JP	Terselenggaranya operasional RPTRA Kelurahan	Laporan		
					Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Adm JP	Terselenggaranya kegiatan Posyandu Kelurahan	Laporan		

					Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui penerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik di Kota Adm JP	Terselenggaranya pengawasan jentik di wilayah Kelurahan	Laporan		
					Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Adm JP	Terselenggaranya operasional PPSU Kelurahan	Laporan		

Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
1	Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Adm JP	Kelurahan Kota Adm JP	Bagian KKPP Setko Adm JP, Muspika, DMI dan MUI, PKK Kelurahan Kota Adm JP, LMK, FKDM, Karang Taruna, Kecamatan Kota Adm JP, UP Statistik Diskominfotik	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	Laporan hasil pengukuran SKM Kelurahan	100	
2	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Adm JP	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP, Satpol PP, LMK, FKDM, Karang Taruna	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya pendeteksian dini permasalahan di wilayah Kelurahan	Laporan	100	
3	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW, LMK tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Adm JP	RT, RW, LMK, Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terselenggaranya peran kelembagaan RT, RW, dan LMK tingkat Kelurahan	Laporan	100	
4	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Adm JP	Satpol PP, FKDM, LMK, Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terlaksananya pengawasan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan	100	
5	Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Adm JP	TPKK Kelurahan, TPKK Kecamatan, Sudin PPAPP Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan 10 Program PKK	Laporan	100	Covid-19
6	Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Adm JP	TPKK Kelurahan, TPKK Kecamatan, Sudin PPAPP Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terselenggaranya operasional RPTRA Kelurahan	Laporan	100	Covid-19
7	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, TPKK Kelurahan	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi	Terselenggaranya kegiatan Posyandu Kelurahan	Laporan	100	Covid-19

				Laporan Kegiatan				
8	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD) dan Chikungunya melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Kader Jumantik	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terseleenggaranya pengawasan jentik di wilayah Kelurahan	Laporan	100	Covid-19
9	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Adm JP	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Adm JP, Sudin LH Kota Adm JP, Sudin Bina Marga Kota Adm JP, SDA Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Laporan Kegiatan	Terseleenggaranya operasional PPSU Kelurahan	Laporan	100	

Rencana Aksi (Renaksi)

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	86	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Bag KKPP Setko Adm JP														Notulen rapat	Koordinasi Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
				Koordinasi teknis pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dengan Muspika, MUI, DMI, PKK, Karang Taruna, FKDM, dan Lurah																	Notulen rapat
				Pelaksanaan survey di Kelurahan																	Data hasil survey
				Penyajian Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tingkat Kelurahan																	Laporan hasil survey
		Terlaksananya pendeteksian dini permasalahan di wilayah Kelurahan	85%	Persiapan, penyusunan KAK, HPS															KAK, HPS	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	
				Penyusunan rencana kerja FKDM																	
				Pembuatan jadwal dan pembagian daerah kerja bagi anggota FKDM Kecamatan																	
				Rapat Koordinasi Internal															Notulen rapat		

			Laporan kegiatan											Laporan kegiatan bulanan				
Terselenggaranya kegiatan Posyandu Kelurahan	100%	Persiapan, penyusunan KAK, HPS												KAK dan HPS		Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Covid-19	
		Penyusunan jadwal rencana kegiatan												Jadwal rencana kegiatan				
		Pelayanan Posyandu: Posyandu Ibu hamil menyusui, balita Posyandu Lansia Pelayanan Kesehatan Umum (KN, imunisasi, oralit, dst)													catatan pengurus Posyandu			
		Laporan kegiatan													Laporan kegiatan bulanan			
Terselenggaranya pengawasan jentik di wilayah Kelurahan	100%	Persiapan, penyusunan KAK, HPS												KAK dan HPS		Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD) dan Chikungunya melalui pengarahannya Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	Covid-19	
		Penyusunan jadwal rencana kegiatan												Jadwal rencana kegiatan				
		Pelaksanaan kegiatan Jumantik													catatan hasil kegiatan kader Jumantik			
		Laporan kegiatan													Laporan kegiatan bulanan			
Terselenggaranya operasional PPSU Kelurahan	100%	Persiapan, penyusunan KAK, HPS												KAK dan HPS		Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan		
		Penyusunan jadwal rencana kegiatan													Jadwal rencana kegiatan			
		Pelaksanaan kegiatan Jumantik													catatan hasil kegiatan kader Jumantik			
		Laporan kegiatan													Laporan kegiatan bulanan			

INDIKATOR 2: PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Tingkat Kota

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	laporan		
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	RKA/DPA		

Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
1	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Bappeda, Subanpeko Kota Adm JP, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm JP, Suban Penerimaan Kas Daerah	Koordinasi Analisa Data Penyusunan Laporan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Laporan	12	
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Bappeda, Subanpeko Kota Adm JP, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm JP, Suban Penerimaan Kas Daerah	Koordinasi Penyusunan RKA/DPA	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	RKA/DPA	8	

Rencana Aksi (Renaksi)

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota	12	Koordinasi													Notulen rapat	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta			
				Analisa Data																Data teranalisa	
				Penyusunan Laporan																	Laporan

dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	keuangan		Laporan														Laporan			
---	----------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

Tingkat Kelurahan

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kelurahan	12		Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kelurahan	laporan		

Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
1	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kelurahan	Kelurahan Kota Adm JP	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda, Subanpeko Kota Adm JP	Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kegiatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kelurahan	laporan	100%	

Rencana Aksi (Renaksi)

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kelurahan	12	Perencanaan													Rencana	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kelurahan		
				Pelaksanaan															Data	
				Laporan																Laporan

INDIKATOR 3: INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Tingkat Kota

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan		
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Non-cascading	Koordinasi penilaian reformasi birokrasi	Persentase terlaksananya koordinasi penilaian reformasi birokrasi	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021	-	-		
						Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi	Laporan	-	-
								Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Laporan	-	-
								Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Laporan	-	-
								Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi	Laporan	-	-
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Laporan	-	-

Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
1	Koordinasi penilaian reformasi birokrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Biro ORB Provinsi DKI Jakarta, Suban Kepegawaian Kota Adm JP, Inspektorat Pembantu Kota Adm JP	Koordinasi Analisa Data Penyusunan Laporan	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Laporan	100% (1)	

2	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Biro ORB Setda Prov DKI Jakarta, Biro Pemerintahan Setda Prov DKI Jakarta, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Koordinasi Analisa Data Penyusunan Laporan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi	Laporan	100% (4)	
		Bagian KKPP Setko Adm JP	Biro ORB Setda Prov DKI Jakarta, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Monitoring Evaluasi Analisa Data Penyusunan Laporan/SK SOP	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Laporan	100% (1)	
		Bagian KKPP Setko Adm JP	Suban Kepegawaian Kota Adm JP, Inspektorat Pembantu Kota Adm JP, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Pembinaan Penyusunan Laporan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Laporan	100% (4)	
		Bagian KKPP Setko Adm JP	Biro ORB Setda Prov DKI Jakarta, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Persiapan Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Laporan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi	Laporan	100% (28)	
		Bagian KKPP Setko Adm JP	Biro ORB Setda Prov DKI Jakarta, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP, Unit JSC Dinas Kominfortik Prov DKI Jakarta	Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Laporan	Terlaksananya Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Laporan	100% (1)	

Rencana Aksi (Renaksi)

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Persentase terlaksananya koordinasi penilaian reformasi birokrasi	1	Koordinasi													Notulen rapat	Non - cascading	Koordinasi penilaian reformasi birokrasi		
				Analisa Data													Data teranalisa				
				Penyusunan Laporan													Laporan				
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi	4	Koordinasi														Pengaduan terkoordinasi	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	
				Analisa Data													Penanganan pengaduan masyarakat tingkat Kot Adm terevaluasi				
				Penyusunan Laporan													Laporan				
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	1	Monitoring Evaluasi													Data hasil Monev				
				Analisa Data													Koreksi, input, usulan				
				Penyusunan Laporan/SK SOP													Laporan/SK SOP				

		Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	4	Pembinaan													Catatan hasil pembinaan					
				Penyusunan Laporan																	Laporan	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi	28	Persiapan																		Kesiapan kuesioner
				Pengendalian dan Evaluasi																		Hasil Evaluasi
				Penyusunan Laporan																		Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	1	Persiapan																		Mekanisme pengukuran
				Pelaksanaan																		Hasil pengukuran
				Penyusunan Laporan																		Laporan

Indikator kinerja di luar indikator kinerja utama (IKU) seperti KSD, sasaran khusus dan sasaran operasional, rencana kerja/ rencana aksi adalah sebagai berikut:

KSD

KSD	Sasaran Strategis	Program	Renaksi	Target			
				B03	B06	B09	B12
20	Meningkatnya kewirausahaan baru	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran di Kelurahan	1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT	1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT	1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT	1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT
			Penyediaan Ruang Usaha		Penetapan lokasi kios (Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm Jakarta Selatan, Kota Adm Jakarta Barat)		
29	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	Penetapan Lokasi Sementara PKL di Stasiun Gondangdia	Relokasi PKL ke lokasi penampungan sementara di Stasiun Gondangdia	Penetapan Lokasi Sementara PKL di Stasiun Gondangdia		
38	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Penyerahan Dokumen BAST Fasos Fasum ke BPAD selaku PPAD beserta tagging ke JakartaSatu/ SIPRAJA	100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD.	100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD.	100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD.	100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD.
39	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021 Data Dukung: Laporan Rekapitulasi Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021		Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022 Data Dukung: Soft Copy Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022	

			Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	<p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)</p> <p>Data Dukung :Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)</p> <p>Data Dukung :</p> <p>Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020</p>	<p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021 (selesai di April 2021)</p> <p>Data Dukung :Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I Tahun 2021 (selesai di akhir April 2021)</p> <p>Data Dukung :</p> <p>Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW I Tahun 2021</p>	<p>1. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022</p> <p>Data Dukung :Dokumen hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2017-2022</p> <p>2. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021 (selesai di Juli 2021)</p> <p>Data Dukung :Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021</p> <p>3. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW II Tahun 2021 (selesai di akhir Juli 2021)</p> <p>Data Dukung :</p> <p>Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW II Tahun 2021</p>	<p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021 (selesai di Oktober 2021)</p> <p>Data Dukung :Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021 (selesai di akhir Oktober 2021)</p> <p>Data Dukung :</p> <p>Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021</p>
			Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	<p>1. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020</p> <p>Data Dukung: Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020</p> <p>2. Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id (akhir Januari 2021)</p> <p>Data Dukung : Screenshot LKIP telah terupload</p>			
61	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021.		<p>TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 80%</p> <p>Catatan : untuk SKPD yang belum mempunyai temuan & rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dimulai 100%.</p> <p>Data Pendukung : Berita Acara hasil verifikasi Inspektorat</p>		<p>TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 85%</p> <p>Catatan : untuk SKPD yang belum mempunyai temuan & rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dimulai 100%.</p> <p>Data Pendukung : Berita Acara hasil verifikasi Inspektorat</p>
63	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersampainya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital		Tersampainya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta	
66	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan	Persetujuan Lokasi Penataan Kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersusunnya Berita Acara Hasil Verifikasi Lokasi Penataan Kawasan (minimal ditandatangani oleh Walikota/Bupati, Kepala Bappeda/Subanppeko/kab, dan Kepala Dinas/Sudin CKTRP)			

			Koordinasi dan pemantauan penyelesaian penyusunan rencana penataan kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat		Tersusunnya muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat		
			Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Tahun 2021 oleh PD/UKPD terkait di Kota Administrasi Jakarta Pusat			Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan (dengan lampiran dokumen Rancangan Rencana Penataan Kawasan wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat yang telah disepakati)	
			Koordinasi permohonan persetujuan Sekda terkait Rancangan Rencana Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat				1. Terlaksananya simulasi penataan kawasan untuk rancangan rencana penataan kawasan di Kota Adm. Jakarta Pusat; 2. Tersedianya nota dinas permohonan persetujuan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat
			Tindak Lanjut Simulasi Penataan Kawasan Tahun 2020 (Kawasan Pecenongan)	Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Pecenongan			
			Kalender pelaksanaan penataan kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kawasan Pasar Baru dan Kawasan Pecenongan)		Tersusunnya Kalender pelaksanaan kegiatan penataan kawasan TA 2021 di Kota Adm. Jakarta Pusat antara Walikota dengan PD dan UKPD yang terkait (Kawasan Pasar Baru dan Kawasan Pecenongan)		
			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan UKPD terkait Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk TA 2021 dan TA 2022				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan UKPD terkait Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk TA 2021 dan TA 2022 (Kawasan Pasar Baru dan Kawasan Pecenongan)
			Penanggulangan RW-RW rawan banjir yang bersifat lokal di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersusunnya daftar RW-RW rawan banjir bersifat lokal di wilayah dan daftar rencana tindakan penanggulangan oleh masing-masing Walikota yang disetujui oleh Asisten Pemerintahan	Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 30% dari daftar RW rawan	Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 60% dari daftar RW rawan	Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 100% dari daftar RW rawan
			Pendampingan aparat wilayah dalam proses partisipasi masyarakat pada program penataan kampung Community Action Plan di Kota Administrasi Jakarta Pusat				Tersusunnya laporan pendampingan aparat wilayah dalam Community Action Plan
			Pengecatan Mural Lokasi +Jakarta di Seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat		Terselesaikannya pengecatan mural lokasi +Jakarta di Seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			Pembangunan Instalasi +Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselesaikannya Perencanaan Instalasi	Instalasi sudah terbangun dengan target masing-masing kota 1		

			Pendampingan Walikota dalam aktivasi kawasan wisata Cikini			Tersusunnya laporan pendampingan Walikota dalam kegiatan aktivasi di kawasan wisata Cikini	Tersusunnya laporan pendampingan Walikota dalam kegiatan aktivasi di kawasan wisata Cikini
			Pendampingan Walikota dalam penataan Wisata Religi: Gereja Immanuel				Tersusunnya laporan pendampingan Walikota dalam penataan destinasi wisata religi Gereja Immanuel
			Pendampingan pengurangan sampah dari sumber pada tingkat RW di Kota Administrasi Jakarta Pusat	- Pendampingan pembentukan bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta - Pendampingan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta (30%)	Pendampingan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta (100%)		Pendampingan pengawasan dan maintain pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan terjadwal di RW yang telah ditetapkan (mengacu pada KSD 26)
73	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Penagihan SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum	5% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah disejahterimakan	1. 10% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah disejahterimakan (April 2021) 2. 25% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah disejahterimakan (Mei 2021) 3. 50% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah disejahterimakan (Juni 2021)	100% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah disejahterimakan (Juli 2021)	

Sasaran Khusus

Kota Administrasi

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	PPK Setko Adm JP	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	
			Belanja Makan dan Minum rapat						
			Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi						
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan	N/A	3	N/A	N/A	WTP

3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik.</p> <p>d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p>	100%	100%	100%	100%	
		Bagian Hukum Setko Adm JP	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi						
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p>Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi</p>	N/A	N/A	N/A	A (81)	
		Bagian KKPP Setko Adm JP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi						

Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	PPK Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100%	100%	100%	100%	

Kelurahan

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	PPK Kelurahan Cideng Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Kebon Kelapa Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	100%	
			Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait / mamin musrenbang		100%	100%	100%	100%	
			PMT Balita dan Lansia		100%	100%	100%	100%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Petojo Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Duri Pulo Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Tamu dan Jamuan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Petojo Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai		100%	100%	100%	100%	
			Pmt Lansia		100%	100%	100%	100%	

		Pmt Balita		100%	100%	100%	100%	
		Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Bendungan Hilir Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Karet Tengsin Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Kebon Melati Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitas Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100%	100%	100%	100%	
		Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan (Penyelenggaraan Makanan dan Minum Rapat)		100%	100%	100%	100%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penyediaan PMT Balita)		100%	100%	100%	100%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penyediaan PMT Lansia)		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Kampung Bali Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Petamburan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	

	PPK Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Pegangsaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Cikini Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Kebon Sirih Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Gondangdia Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100%	100%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Kwitang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Kenari Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%		

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Paseban Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Bungur Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Cempaka Putih Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		100%	100%	100%	100%	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Cempaka Putih Barat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
	PPK Kelurahan Galur Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	

PPK Kelurahan Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT, RW dan LMK	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Makan dan Minum 1 x 24 Jam	100%	100%	100%	100%
PPK Kelurahan Kampung Rawa Kota Administrasi Jakarta Pusat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100%	100%	100%	100%
PPK Kelurahan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
PPK Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	100%	100%	100%	100%
	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	100%
PPK Kelurahan Harapan Mulya Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	100%
PPK Kelurahan Cempaka Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%
PPK Kelurahan Utan Panjang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%
PPK Kelurahan Sumur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

		Batu Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Gunung Sahari Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
		PPK Kelurahan Kartini Kota Administrasi Jakarta Pusat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	

Sasaran Operasional

Kota Administrasi

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Bag KKPP Setk Adm JP	Tupoksi sesuai Pergub 152 Tahun 2019	Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Bag KKPP Setk Adm JP		Koordinasi Penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	

3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Bag Pemerintahan Setk Adm JP		Koordinasi oengisian kuesioner kualitas layanan kepada masyarakat	85	87	90	93	
4	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Bag Keuangan Setk Adm JP		Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25%	25%	25%	25%	

Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Para Camat Kota Adm JP	Tupoksi sesuai Pergub 152 Tahun 2019	Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Para Camat Kota Adm JP		Koordinasi Penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Para Camat Kota Adm JP		Koordinasi oengisian kuesioner kualitas layanan kepada masyarakat	85	87	90	93	

Kelurahan

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Para Lurah Kota Adm JP	Tupoksi sesuai Pergub 152 Tahun 2019	Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Para Lurah Kota Adm JP		Koordinasi Penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Para Lurah Kota Adm JP		Koordinasi oengisian kuesioner kualitas layanan kepada masyarakat	85	87	90	93	

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengikuti rancangan akhir RPJMD, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 hanya diambil dari dua layanan yaitu Ketertiban Umum dan PPSU. Beberapa poin yang memengaruhi keputusan tersebut adalah ditetapkan pembatasan sosial skala besar selama beberapa bulan di tahun 2021 yang tidak memungkinkan untuk kelurahan melaksanakan kegiatan penyediaan makanan bagi balita dan lansia, pemeriksaan jentik oleh para kader jumantik ke rumah-rumah di lingkungannya, membuka RPTRA untuk kegiatan masyarakat, dan pembinaan masyarakat sekitar melalui kegiatan PKK. Kemudian target disesuaikan dengan kondisi saat ini menjadi 86 (menurut perencanaan di RPJMD dan Renstra, target tahun 2021 seharusnya 88 atau skala 4).

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dimulai sejak bulan Mei 2021 dengan mengumpulkan data-data pendukung 8 (delapan) komponen dari aspek pemenuhan dan reform penilaian Reformasi Birokrasi, yang kemudian diinput ke dalam situ menpan (pmprb.menpan.go.id). Sampai akhir Tahun 2021 penilaian masih berproses di Kemenpan RB RI. Oleh karena itu hasil capaian Provinsi, Kota/ Kabupaten dan Perangkat Daerah lain yang mengampu target Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) masih N/A. Selain indikator kinerja utama di atas, indikator kinerja lain tidak mengalami perubahan target.

Pelaksanaan anggaran di Tahun 2021 mengalami beberapa masa perubahan dengan adanya Pergeseran APBD 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2021 kemudian APBD perubahan di triwulan terakhir Tahun 2021.

AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Kepala Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada umumnya mencapai target, selain penilaian Reformasi Birokrasi yang sampai akhir Tahun 2021 masih dalam proses di Kemenpan RB RI.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Sasaran Strategis					
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85	N/A	N/A
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	86	91.63	106.5%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	96.24%	105.76%
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	100%	100%	100%
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	100%	100%	100%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	100%	100%	100%
Sasaran Khusus					
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	3	100%
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	81*	100%
Sasaran Operasional					
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99.99%	99.99%
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	93	90.66%	97.48%
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

Tabel 11. Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Rata-rata capaian tidak bisa didapatkan karena masih ada Sasaran yang belum mendapatkan nilai/ realisasinya, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang penilaiannya masih berproses di Kemenpan RB.

Berdasarkan data di atas, dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama, terdiri dari:

a. Capaian Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian Reformasi Birokrasi yang dimulai sejak bulan Mei 2021 dengan mengumpulkan data-data pendukung 8 (delapan) komponen dari aspek pemenuhan dan reform penilaian Reformasi Birokrasi dinilai telah dilaksanakan dengan cukup baik. Beberapa catatan dari penilaian Tahun 2020 yaitu penyusunan proses bisnis, meningkatkan perubahan sesuai jumlah agen perubahan di Walikota, dan peningkatan capaian kinerja telah diakomodir dengan baik. Saat ini proses bisnis Kota Administrasi Jakarta Pusat telah sampai di tahap draft untuk diharmonisasikan dengan proses bisnis provinsi, kemudian dengan ditetapkannya agen perubahan Tahun 2020-

2022 per perangkat daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 perubahan yang telah dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Pusat masih memenuhi syarat, serta capaian kinerja meningkat sesuai yang diharapkan. Diperkirakan nilai Reformasi Birokrasi Kota Administrasi Jakarta pusat di Tahun 2021 akan sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 95,32.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi adalah bentuk Kota Administrasi yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berarti kebijakan-kebijakan terkait manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan disusun di tingkat provinsi (payung hukum) dan disesuaikan implementasinya di tingkat kota, kecamatan, kelurahan. Sehingga baik buruknya penilaian sebagian besar didasarkan kepada kinerja Pemerintah Kota Administrasi sendiri karena dasar-dasar hukum yang mendukung sudah ada. Kondisi seperti ini juga berpotensi gagal apabila selain kinerja Pemerintah kota yang di bawah standar, tingkat provinsi tidak sigap dalam menangkap isu-isu yang diberikan oleh kota. Sejauh ini, pelaksanaan hal-hal berkaitan dengan reformasi birokrasi dianggap masih terlaksana dengan baik.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki beberapa Indikator yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, antara lain:

- Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %
- Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum
- Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)

b. Capaian Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2021 capaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) adalah 91,63, atau 106,5% melebihi target.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan pada 9 (Sembilan) unsur pelayanan, yaitu: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Survey Kepuasan Masyarakat dan pelaporan dilaksanakan mulai Oktober sampai awal Desember Tahun 2021 mengikuti jadwal. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yang dilakukan mulai dari Kelurahan, dihimpun oleh Kecamatan dan disusun menjadi laporan Kota/ Kabupaten.

Pelaksanaan SKM dilakukan dengan menggiatkan koordinasi pelaksanaan dengan tingkat Kelurahan, Kecamatan, UP Statistik Dinas Kominfo, dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta. Survey dilaksanakan melalui link mobile dengan tarikan data langsung dikelola oleh UP Statistik Dinas Kominfo. Jumlah yang masuk untuk Pelayanan PPSU sebesar 6.707 responden dengan proporsi 49.95% laki-laki dan 50.05% perempuan. Jumlah yang masuk untuk Pelayanan Ketertiban Umum sebesar 6.203 responden dengan proporsi 44.04% laki-laki dan 55.96% perempuan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Kecamatan, adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pelayanan PPSU	Pelayanan Ketertiban Umum	Nilai IKM
1	2	3	4	5
1	Menteng	92.59	92.24	92.42
2	Johar Baru	93.87	94.18	94.02
3	Sawah Besar	90.42	89.88	90.15
4	Senen	91.46	90.88	91.17
5	Cempaka Putih	93.97	94.20	94.08
6	Gambir	90.13	90.26	90.2
7	Kemayoran	93.76	93.08	93.42
8	Tanah Abang	87.49	87.69	87.59

Tabel 12. Nilai rata-rata IKM Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini antara lain kinerja petugas di tingkat Kelurahan yang masih berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Selain itu cara pelaksanaan survey dengan sistem online sangat sesuai dengan kondisi pandemi yang membatasi kontak secara langsung.



Gambar 4. Operasi tertib masker

Beberapa analisa yang didapat berdasarkan hasil survey adalah:

- masyarakat menganggap hasil kerja petugas PPSU belum maksimal dalam hal penanganan sampah. Setiap bulan pengaduan masuk melalui CRM didominasi oleh laporan terkait sampah. Hal ini menjadi masukan pemerintah untuk selain meningkatkan kinerja petugas, tetapi juga menumbuhkan sikap dan pola pikir masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan karena kebersihan bukan hanya tanggung jawab satu pihak semata.
- Masyarakat menilai kompetensi petugas PPSU masih perlu ditingkatkan dengan pelatihan
- Sarana pengaduan bersifat online belum dapat menjangkau seluruh masyarakat karena tidak semua memiliki kefasihan setara dalam hal penggunaan teknologi
- Waktu respons kurang cepat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana belum maksimal karena anggaran pengadaan alat kebersihan dan anggaran pemeliharaan sempat mengalami refocusing



Gambar 5. Kegiatan PPSU

Beberapa program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah :

- Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki Indikator yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, yaitu Indikator Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Indikator Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
- Program Pengelolaan Kecamatan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

c. Capaian Indikator Kinerja: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mendapatkan capaian 96,24%. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini dilakukan dengan mengukur 3 komponen, yaitu:

- a) Penyerapan anggaran. Komponen ini mengukur Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

- b) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%. Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$
2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$. Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$. Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan anggaran berkualitas adalah beberapa kegiatan dapat terus dilaksanakan tanpa mengandalkan anggaran, sehingga pada saat anggaran tertunda atau bahkan mengalami refocusing, kegiatan dapat terus dilaksanakan melalui jalan alternatif, seperti koordinasi melalui zoom, pelaporan dalam bentuk soft copy, dan koordinasi alternatif lain tanpa anggaran.

Faktor yang mendukung ketidakberhasilannya suatu kegiatan untuk dilaksanakan adalah apabila sifat kegiatan tersebut sangat dipengaruhi dengan ketersediaan anggaran, seperti contohnya penyediaan fasilitas PMT balita dan lansia dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mendukung kegiatan Posyandu. Selain itu juga ada faktor luar seperti di masa pandemi ini semua kegiatan yang melibatkan kontak dekat dengan/ antar masyarakat belum dijalankan.

Seluruh program yang diampu Kota Administrasi Jakarta Pusat berperan dalam mencapai indikator kinerja ini.

d. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran di Kelurahan	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 	100%	100%	100%
		<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 	100%	100%	100%
		<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 	100%	100%	100%
		<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 	100%	100%	100%

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT			
2	Penyediaan Ruang Usaha	B06: Penetapan lokasi kios (Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm Jakarta Selatan, Kota Adm Jakarta Barat)	100%	100%	100%

Tabel 13. Target dan Capaian KSD Nomor 20 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Target sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di 44 Kelurahan/ 8 Kecamatan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat terlaksana dengan mekanisme penyampaian informasi melalui group whatsapp para ketua RW dan RT serta diteruskan kepada warga dengan hasil laporan sosialisasi dari Kelurahan, hasil peminatan pendaftaran melalui website <https://bit.ly/Jakpreneurtw1JP> serta hasil Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT.

Target Penetapan lokasi kios (Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Walikota Administrasi Jakarta Pusat telah mengusulkan lokasi pendirian kios di sisi jalan utama Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta melalui surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 662/-1.824.242 Tanggal 20 April 2021 hal Usulan Lokasi Pendirian Kios di Sisi Jalan Utama Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator persentase jumlah wirausaha baru yang tercapai dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Jumlah kawasan yang tertata.

Target tercapai berkat koordinasi yang baik dari berbagai pihak.

e. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD nomor 29)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penetapan Lokasi Sementara PKL di Stasiun Gondangdia	B03: Relokasi PKL ke lokasi penampungan sementara di Stasiun Gondangdia	100%	100%	100%
		B06: Penetapan Lokasi Sementara PKL di Stasiun Gondangdia	100%	100%	100%

Tabel 14. Target dan Capaian KSD Nomor 29 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Target Relokasi PKL ke lokasi penampungan sementara di Stasiun Gondangdia, telah dilaksanakan sosialisasi Penataan Stasiun Gondangdia tahap pertama dan kedua untuk PKL di Stasiun Gondangdia Jl Srikaya II, keberadaan PKL tidak mengganggu pekerjaan pembangunan penataan Stasiun Gondangdia sehingga disepakati tidak diperlukan relokasi. Kondisi sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan sedang berjalan.

Target Penetapan Lokasi Sementara PKL di Stasiun Gondangdia terlaksana dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang menjelaskan Jl. Srikaya II Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Menjadi JP 79.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator yang berkaitan adalah Jumlah Kawasan yang Tertata.

Target tercapai berkat koordinasi yang baik dari berbagai pihak.

f. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (KSD Nomor 73)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penagihan SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum	B03: 5% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahkan	100%	100%	100%
		B06: 1. 10% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah	100%	100%	100%

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		diserahtherimakan (April 2021) 2. 25% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahtherimakan (Mei 2021) 3. 50% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahtherimakan (Juni 2021)			
		B09: 100% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahtherimakan (Juli 2021)	100%	100%	100%

Tabel 15. Target dan Capaian KSD Nomor 73 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Target B03: Pelaksanaan kegiatan KSD-73 Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian untuk Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat berlokasi di Jalan Kesehatan Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir dan di Jalan Raden Saleh Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng. Untuk Koridor Jalan Kesehatan terdapat 1 IPPR atas nama Mabes TNI qq Paspampres (Penyediaan) dan sudah disampaikan Surat Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat hal pemenuhan kewajiban. Untuk Koridor Jalan Kesehatan terdapat 1 SIPPT atas nama Yayasan Kesehatan PGI Cikini (Penyerahan lahan dan konstruksi) lahan kewajiban sudah berfungsi sebagai fasos fasum dan sudah dilakukan penelitian fisik (BAPF) oleh TP3W Kota Adm. Jakarta Pusat tahun 2014. Proses BAST terkendala oleh persyaratan pembayaran PBB-P2 lahan kewajiban.

Target B06: Pelaksanaan kegiatan KSD-73 Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian untuk Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat berlokasi di Jalan Kesehatan Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir dan di Jalan Raden Saleh Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng. Untuk Koridor Jalan Kesehatan terdapat 1 IPPR atas nama Mabes TNI qq Paspampres, sesuai diktum keempat IPPR tersebut bahwa kewajibannya adalah penyediaan bidang tanah Prasarana Jalan seluas 3.620 m² yang apabila dilaksanakan kegiatan pelebaran jalan agar memundurkan pagar sesuai rencana kota. Terkait kewajiban ini sudah disampaikan Surat Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat hal pemenuhan kewajiban. Oleh sebab itu kewajiban penyediaan ini dapat dipenuhi pada saat kegiatan pelaksanaan penataan pedestrian dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang dimulai dari pengukuran terace marga jalan. Untuk Koridor Jalan Kesehatan terdapat 1 SIPPT atas nama Yayasan Kesehatan PGI Cikini (Penyerahan lahan dan konstruksi) lahan kewajiban sudah berfungsi sebagai fasos fasum dan sudah dilakukan penelitian fisik (BAPF) oleh TP3W Kota Adm. Jakarta Pusat tahun 2014. Proses BAST terkendala oleh persyaratan pembayaran PBB-P2 lahan kewajiban. Terkait hal ini sudah disampaikan Surat

Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat Nomor 886/-1.711.534 Tanggal 3 Juni 2021 hal Pemenuhan kewajiban fasos fasum sesuai SIPPT.

Target B09: Pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kewajiban fasos fasum sesuai SIPPT yang berlokasi di Jalan Kesehatan yakni atas nama Yayasan Kesehatan PGI Cikini (Penyerahan lahan dan konstruksi) sampai saat ini masih menunggu kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran PBB-P2 lahan kewajiban tersebut. Terkait hal ini sudah disampaikan Surat Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat Nomor 886/-1.711.534 Tanggal 3 Juni 2021 hal Pemenuhan kewajiban fasos fasum sesuai SIPPT.



Gambar 6. Penandatanganan BAST

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

g. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD nomor 38)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penyerahan Dokumen BAST Fasos Fasum ke BPAD selaku PPAD beserta tagging ke JakartaSatu/ SiPRAJA	B03: 100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD	100%	100%	100%
		B06: 100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD	100%	100%	100%
		B09: 100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD	100%	100%	100%
		B12: 100% Dokumen BAST Tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD	100%	100%	100%

Tabel 16. Target dan Capaian KSD Nomor 38 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Target B03: Dalam triwulan I, telah dilaksanakan 1 penandatanganan BAST kewajiban fasos fasum di Kota Adm. Jakarta Pusat atas nama PT Sahid berupa lahan rencana marga jalan. Dokumen asli BAST dan dokumen teknis pendukungnya telah disampaikan ke BPAD Provinsi DKI Jakarta. Dokumen BAST dan Dokumen kelengkapannya telah di tagging ke sistem informasi : jakartasatu.go.id/sipraja

Target B06: Dalam triwulan II belum ada dilakukan penandatanganan BAST di Kota Adm. Jakarta Pusat.

Target B09: Dalam triwulan III, telah dilaksanakan 3 penandatanganan BAST kewajiban fasos fasum di Kota Adm. Jakarta Pusat atas nama PT Intergraha Ekamakmur, PT. Surya Gading Mas Sakti dan PT. Saranapratama Artamandiri. Dokumen asli BAST dan dokumen teknis pendukungnya telah disampaikan ke BPAD Provinsi DKI Jakarta. Dokumen BAST dan Dokumen kelengkapannya telah di tagging ke sistem informasi : jakartasatu.go.id/sipraja

Target B12: Dalam triwulan IV, telah dilaksanakan 2 penandatanganan BAST kewajiban fasos fasum di Kota Adm. Jakarta Pusat atas nama PT. Bangun Inti Artha dan PT. Sinar Kharisma Nusantara/PT. Mustafa Centre dimana dokumen BAST dan dokumen teknis pendukungnya telah disampaikan ke BPAD Provinsi DKI Jakarta. Dokumen BAST dan Dokumen kelengkapannya telah di tagging ke sistem informasi : jakartasatu.go.id/sipraja

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

h. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (KSD Nomor 39)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	<p>B03: Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021</p> <p>Data Dukung: Laporan Rekapitulasi Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021</p> <p>B09: Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022</p>	100%	100%	100%
			100%	100%	100%

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Data Dukung: Soft Copy Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022			
2	Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	<p>B03:</p> <p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)</p> <p>Data Dukung :Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020</p>	100%	100%	100%
		<p>B06:</p> <p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021 (selesai di April 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I Tahun 2021 (selesai di akhir April 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW I Tahun 2021</p>	100%	100%	100%
		<p>B09:</p> <p>1. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022</p> <p>Data Dukung : Dokumen hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2017-2022</p> <p>2. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021 (selesai di Juli 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021</p> <p>3. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW II Tahun 2021 (selesai di akhir Juli 2021)</p> <p>Data Dukung : Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW II Tahun 2021</p>	100%	100%	100%
		<p>B12:</p> <p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021 (selesai di Oktober 2021)</p>	100%	100%	100%

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Data Dukung : Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021 2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021 (selesai di akhir Oktober 2021) Data Dukung :Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021			
3	Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	B03: 1. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 Data Dukung: Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 2. Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id (akhir Januari 2021) Data Dukung : Screenshot LKIP telah terupload	100%	100%	100%

Tabel 17. Target dan Capaian KSD Nomor 39 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

i. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (KSD Nomor 61)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Kota Administrasi Jakarta Pusat atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021	B06: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 80% Catatan : untuk SKPD yang belum mempunyai temuan & rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dimulai 100%. Data Pendukung : Berita Acara hasil verifikasi Inspektorat	100%	100%	100%
		B12: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 85%	100%	100%	100%

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Catatan : untuk SKPD yang belum mempunyai temuan & rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dimulai 100%. Data Pendukung : Berita Acara hasil verifikasi Inspektorat			

Tabel 18. Target dan Capaian KSD Nomor 61 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

j. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (KSD Nomor 63)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	B03: Tersampainya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital	100%	100%	100%
		B09: Tersampainya data hasil kuisisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta	100%	100%	100%

Tabel 19. Target dan Capaian KSD Nomor 63 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

k. Capaian Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (KSD Nomor 66)

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persetujuan Lokasi Penataan Kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B03: Tersampainya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang	100%	100%	100%

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital			
2	Koordinasi dan pemantauan penyelesaian penyusunan rencana penataan kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B06: Tersusunnya muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat	100%	100%	100%
3	Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Tahun 2021 oleh PD/UKPD terkait di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B09: Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan (dengan lampiran dokumen Rancangan Rencana Penataan Kawasan wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat yang telah disepakati)	100%	100%	100%
4	Koordinasi permohonan persetujuan Sekda terkait Rancangan Rencana Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B12: 1. Terlaksananya simulasi penataan kawasan untuk rancangan rencana penataan kawasan di Kota Adm. Jakarta Pusat; 2. Tersedianya nota dinas permohonan persetujuan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat	100%	100%	100%
5	Tindak Lanjut Simulasi Penataan Kawasan Tahun 2020 (Kawasan Pecenongan)	B03: Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Pecenongan	100%	100%	100%
6	Kalender pelaksanaan penataan kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kawasan Pasar Baru dan Kawasan Pecenongan)	B06: Tersusunnya Kalender pelaksanaan kegiatan penataan kawasan TA 2021 di Kota Adm. Jakarta Pusat antara Walikota dengan PD dan UKPD yang terkait (Kawasan Pasar Baru dan Kawasan Pecenongan)	100%	100%	100%
7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan UKPD terkait Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk TA 2021 dan TA 2022	B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan UKPD terkait Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk TA 2021 dan TA 2022 (Kawasan Pasar Baru dan Kawasan Pecenongan)	100%	100%	100%
8	Penanggulangan RW-RW rawan banjir yang bersifat lokal di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B03: Tersusunnya daftar RW-RW rawan banjir bersifat lokal di wilayah dan daftar rencana tindakan penanggulangan oleh masing-masing Walikota yang disetujui oleh Asisten Pemerintahan	100%	100%	100%
		B06: Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 30% dari daftar RW rawan	100%	100%	100%
		B09: Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 60% dari daftar RW rawan	100%	100%	100%
		B12: Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 60% dari daftar RW rawan	100%	100%	100%

No	Nama Renaksi	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 100% dari daftar RW rawan			
9	Pendampingan aparat wilayah dalam proses partisipasi masyarakat pada program penataan kampung Community Action Plan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B12: Tersusunnya laporan pendampingan aparat wilayah dalam Community Action Plan	100%	100%	100%
10	Pengecatan Mural Lokasi +Jakarta di Seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	B06: Terselesaikannya pengecatan mural lokasi +Jakarta di Seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	100%	100%	100%
11	Pembangunan Instalasi +Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B03: Terselesaikannya Perencanaan Instalasi	100%	100%	100%
		B06: Instalasi sudah terbangun dengan target masing-masing kota 1	100%	100%	100%
12	Pendampingan Walikota dalam aktivasi kawasan wisata Cikini	B09: Tersusunnya laporan pendampingan Walikota dalam kegiatan aktivasi di kawasan wisata Cikini	100%	100%	100%
13	Pendampingan Walikota dalam penataan Wisata Religi: Gereja Immanuel	B12: Tersusunnya laporan pendampingan Walikota dalam penataan destinasi wisata religi Gereja Immanuel	100%	100%	100%
14	Pendampingan pengurangan sampah dari sumber pada tingkat RW di Kota Administrasi Jakarta Pusat	B03: • Pendampingan pembentukan bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta • Pendampingan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta (30%)	100%	100%	100%
		B06: Pendampingan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta (100%)	100%	100%	100%
		B12: Pendampingan pengawasan dan maintain pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan terjadwal di RW yang telah ditetapkan (mengacu pada KSD 26)	100%	100%	100%

Tabel 20. Target dan Capaian KSD Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

- Target Tersusunnya Berita Acara Hasil Verifikasi Lokasi Penataan Kawasan (minimal ditandatangani oleh Walikota/Bupati, Kepala Bappeda/Subanppeko/kab, dan Kepala Dinas/Sudin CKTRP): Telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Lokasi

Penataan Kawasan Tahun 2021 untuk Kota Adm. Jakarta Pusat dan disepakati kawasan yang akan dilakukan penyusunan kajian penataan kawasannya adalah Kawasan Petojo Enclek.

- Target tersusunnya muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat: Perkembangan pelaksanaan penyusunan muatan rencana Kajian Penataan Kawasan Petojo Enclek telah memasuki penyusunan draft laporan akhir.
- Target Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan (dengan lampiran dokumen Rancangan Rencana Penataan Kawasan wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat yang telah disepakati) : Telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Rancangan Penataan Kawasan Petojo Enclek TA 2021.
- Target Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Pecenongan: Telah dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Rancangan Penataan Kawasan Pecenongan Kota Adm. Jakarta Pusat, dengan 15 rancangan usulan kegiatan.
- Telah disusun Kalender Rencana Penataan Kawasan Pasar Baru dan Pecenongan Tahun Anggaran 2021 meliputi kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai Kali Ciliwung Lama (segmen Pintu Air Istiqlal s.d. Jl. Samanhudi), Rehabilitasi Loksem JP25, Gang Poseng, Penyelenggaraan Festival Pasar Baru dan Kuliner Pecenongan.
- Telah dilakukan verifikasi terhadap 146 Usulan Musyawarah RW Rawan Banjir, dan diusulkan 33 RW Rawan Banjir di Kota Adm. JP.



Gambar 7. Kegiatan Gerebeg Lumpur

- Telah terlaksana tindakan penanggulangan RW Rawan Banjir dengan progres pekerjaan mencapai 100 %(dari target keberhasilan akhir tahun 100 %)
- Guna mendukung Penataan Destinasi Wisata Gereja Immanuel, WJP melakukan pendampingan dalam bentuk koordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pemindahan tiang PJU dan pembuatan rekomendasi teknis izin akses masuk ke halaman Gereja Immanuel.



Gambar 8. Peresmian Instalasi + Jakarta

- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melakukan revisi SK RW Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup 389 RW telah mendukung Program Pemerintah DKI Jakarta.
- Lokasi Percontohan di Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah di 3 lokasi kelurahan (Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat dan Rawasari) di Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Terlaksananya pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal di 50 % RW (198 RW).

Dalam pelaksanaan KSD ini keberhasilan didukung oleh koordinasi yang baik antara Walikota dengan Dinas, Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan terkait. Setiap SKPD/UKPD sudah memahami pentingnya kerjasama untuk pencapaian bersama. Refocusing anggaran tentu saja memengaruhi pelaksanaan anggaran dinas/suku dinas sehingga beberapa target tidak bisa dilaksanakan maksimal, tetapi pihak Walikota telah melaksanakan target bagiannya dengan baik.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator yang berkaitan adalah Jumlah Kawasan yang Tertata.

I. Capaian Indikator Kinerja: Persentase Pemanfaatan E-Order

Sistem e-Order adalah konsep pasar online UMK Provinsi DKI Jakarta di mana para pelaku Usaha Mikro/Kecil (UMK) dapat mempromosikan produk barang dan jasanya dan SKPD/UKPD dapat memesan dan pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu peningkatan bisnis pada pelaku UKM. Target dinilai dengan jumlah rupiah realisasi Belanja

Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut.

Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2021 belum dapat mencapai target secara riil karena terbentur ketersediaan dana dengan adanya refocusing. Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan pengecualian atas dasar tersebut.

Semua program dengan komponen makan minum rapat masuk ke dalam kategori ini.

m. Capaian Indikator Kinerja: Opini laporan keuangan daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah adalah Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. Konversi nilai opini pemeriksaan Laporan Keuangan, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%).

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan opini 3 atau Wajar Tanpa Pengecualian. Ini menandakan bahwa laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh BPK.

n. Capaian Indikator Kinerja: Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.
- b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi.
- c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik.
- d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.

Perhitungan :

- a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
- b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.
- c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.
- d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.

o. Capaian Indikator Kinerja: Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021

Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81). Berdasarkan evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat pada tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mencapai target.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

p. Capaian Indikator Kinerja: Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan adalah cepat tanggapnya para unit kerja terkait dalam hal koordinasi tindak lanjut arahan Gubernur.

q. Capaian Indikator Kinerja: Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Masyarakat Jakarta merupakan contoh masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Setiap harinya, ada banyak aspirasi yang masuk dari warga Jakarta berupa kritik, saran dan apresiasi positif atas bentuk pelayanan serta sarana dan prasarana di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM menyebutkan beberapa kanal aduan resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu JAKI, SMS, email, Qlue, Facebook, Twitter, Balai Warga, Lapor 1708, Pengaduan Balaikota, Pengaduan Inspektorat, Pengaduan Walikota, Pengaduan Kecamatan, Pengaduan Kelurahan dan Pengaduan melalui akun media sosial Gubernur.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %

Pada tahun 2021 persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yang selesai pada waktunya mencapai 99,99%. Hal tersebut didukung oleh cepat tanggapnya para unit kerja terkait dalam menangkap koordinasi dan menyelesaikan pengaduan.

r. Capaian Indikator Kinerja: Survei Kepuasan Masyarakat (SKLM)

Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Survei Kinerja Walikota/ Bupati, Camat dan Lurah. Responden Survey Walikota, Camat, Lurah telah ditentukan berdasarkan tingkatan masing-masing, seperti untuk Survey Walikota, responden antara lain: Camat, Dewan Kota, FKDM kota, TP PKK Kota, FPK, FKUB, Karang Taruna Kota, FORMAPEL, Ketua MUI Kota, Ketua DMI Kota, DANDIM, KAPOLRES, Ketua HIPMI Kota, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua KADIN, Ka.

Kejaksanaan Negeri. Survei dilaksanakan melalui sistem Jaksurvei dan nilai secara otomatis masuk ke dalam perhitungan TPP.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Faktor keberhasilan yang memengaruhi adalah para responden telah memahami pelaksanaan survei karena telah berjalan beberapa tahun. Faktor kegagalan bisa dipengaruhi oleh pemahaman penggunaan sistem terutama untuk mereka yang baru menduduki jabatannya.

s. Capaian Indikator Kinerja: Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat). Realisasi target di Tahun 2021 adalah 100%. Faktor keberhasilan yang memengaruhi adalah koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dibanding Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	(Target) Realisasi Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	
Sasaran Strategis						
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	(85) N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	(Target) Realisasi Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	(80) 82,26	(83) 83,58	(86) 87,42	(86)* 91,63
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	N/A	N/A	(100%) 94,59%	(91%) 96,24%
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	-	-	100% 100%	100% 100%
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	-	-	-	100% 100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	-	100% 100%	100% 100%	100% 100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	-	-	100% 100%	100% 100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	-	-	100% 100%	100% 100%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	-	-	100% 100%	100% 100%
		Persentase penyelesaian	-	-	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	(Target) Realisasi Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	
		rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)			100%	100%
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	-	100%	100%	100%
				100%	100%	100%
Sasaran Khusus						
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	-	-	30%	100%
					30%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	-	-	3	3
					3	3
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	-	100%	100%
					100%	100%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	-	-	-	81*
						81
Sasaran Operasional						
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	-	-	100%	100%
					100%	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	-	-	100%	100%
					99,9%	99,9%
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	90	93
					88.1	90.66
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut	-	-	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	(Target) Realisasi Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)			100%	100%

* berdasarkan evaluasi di tingkat provinsi target thn 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat diturunkan dari semula 88 (menurut RPJMD) menjadi 86

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tahun-tahun sebelumnya

Indeks Reformasi Birokrasi diamanatkan sebagai salah satu kinerja utama mulai Tahun 2021, meskipun Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengikuti penilaian sejak Tahun 2020 dengan nilai 95,32.

Realisasi Indikator Kinerja IKM selama empat tahun terakhir selalu mencapai target dan mengalami peningkatan secara umum. Capaian tahun 2018 sebesar 102,82%, 2019 capaian 100,7%, Tahun 2020 capaian 101,65%, kemudian capaian 106,5% di Tahun 2021.

Target persentase kualitas pelaksanaan anggaran diturunkan menjadi 91% untuk semua Perangkat Daerah setelah di tahun sebelumnya ditetapkan sebesar 100%. Hasilnya pada Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan realisasi 96,24% atau capaian 105,76% dari target.

Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah ditetapkan setiap tahun sehingga pengampu target dari tahun ke tahun selalu mengalami penyesuaian.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada RPJMD Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	68	73	78	85	91

	Realisasi Kota Adm JP		-	-	-	N/A	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	80	83	86	88*	88,5
	Realisasi Kota Adm JP		82,26	83,58	87,42	91,63	
3	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	100%	91%	91%
	Realisasi Kota Adm JP				94,59%	96,24%	

* berdasarkan evaluasi di tingkat provinsi target thn 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat diturunkan dari semula 88 (menurut RPJMD) menjadi 86

Tabel 22. Perbandingan Target Kinerja Sasaran Strategis dengan RPJMD 2017-2022

Dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 masih berada di atas target. Target RPJMD diadopsi langsung ke kinerja Walikota sehingga tidak ada perubahan besaran. Skala 1-4 di Indeks Kepuasan Masyarakat adalah konversi dari skala 1-100 sesuai Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tidak memiliki perbandingan dengan Standar Nasional karena komponen yang diukur memiliki kekhususan untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (contoh: PPSU), selain itu pelayanan yang diukur merupakan pelayanan tanpa persyaratan dan biaya (berbeda dengan pelayanan yang dituju dalam Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017).

Untuk keperluan perbandingan, maka kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Pusat dibandingkan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan 1000.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kota/Kabupaten Administrasi lain di Jakarta pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Target Kinerja Sasaran Kota/Kabupaten Administrasi					
			JP	JB	JS	JT	JU	Kep 1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	4 (91.63)	4 (90.62)	4 (91.28)	4 (92.82)	4 (93.85)	3 (87.72)
3	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,24%	89.63%	96,6%	91,91%	91%	92.23%

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kota/Kabupaten Administrasi lain Tahun 2021

Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 berada di peringkat ketiga dan untuk indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran berada di peringkat kedua.

Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisa efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja akan dijelaskan secara lebih mendetil di bawah.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel di bawah:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
Sasaran Strategis					
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	79.97	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
	integritas aparatur				
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	106.55	95.26	96.26
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran		105.76	96.9	96.9
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	100	97.08	97.08
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100	97.71	97.71
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	100	73.97	73.97
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100	73.97	73.97
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	100	73.97	73.97
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100	73.97	73.97
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE	100	73.97	73.97

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
		(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)			
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	100	97.71	97.71
Sasaran Khusus					
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa*	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	56.75	56.75
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	100	73.97	73.97
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100	97.08	97.08
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	100	73.97	73.97
Sasaran Operasional					
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	73.97	73.97
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	99.99	73.97	73.97
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	97.48	73.97	73.97

Catatan:

*Kota Administrasi Jakarta Pusat meminta pengecualian atas dasar pembatasan kontak dekat, keterlambatan SPD, refocusing anggaran, dan kontrak yang sudah dibuat dengan pihak ketiga sebelum ketentuan penggunaan e-Order keluar.

Penyerapan anggaran dihitung dari Kegiatan yang tidak mengalami refocusing, SPD sudah turun, dan ode rekening tersedia di sistem e-Order

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021

Salah satu faktor yang mendukung tingginya penyerapan anggaran adalah adanya APBD perubahan yang ditetapkan di triwulan terakhir. Dengan adanya perubahan ini, maka anggaran yang mengalami keterlambatan (SPD turun kegiatan selesai dilaksanakan), anggaran untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (rapat koordinasi menggunakan zoom meeting), dan kegiatan yang terkena refocusing bisa disesuaikan.

Penyerapan anggaran pada tabel di atas diperhitungkan berdasarkan penyerapan anggaran Program di mana kegiatan yang mendukung sasaran tersebut berada, atau diperhitungkan secara keseluruhan.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki beberapa Indikator yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, antara lain Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %, Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum, Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

Beberapa program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

- Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki Indikator yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, yaitu Indikator Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Indikator Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

- Program Pengelolaan Kecamatan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Kualitas penggunaan anggaran adalah seluruh program yang diampu Kota Administrasi Jakarta.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 20 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator persentase jumlah wirausaha baru yang tercapai dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Jumlah kawasan yang tertata.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 29 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator yang berkaitan adalah Jumlah Kawasan yang Tertata.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 73 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 38 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 39 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 61 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 63 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 66 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator yang berkaitan adalah Jumlah Kawasan yang Tertata.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja pemanfaatan e-order adalah semua program dengan komponen makan minum rapat.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja implementasi rencana strategis komunikasi publik adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Capaian predikat SAKIP adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tindak lanjut arahan Gubernur adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja penyelesaian pengaduan masyarakat adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran Strategis										
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	N/A	N/A	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Indeks	86	91.63	106.55	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	188.123.581.792	183.835.142.488	97.72
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	41.512.088.258	35.357.022.827	85.17
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.004.294.822	1.960.466.380	97.81
							Program Pengelolaan Kecamatan	142.617.291.543	140.959.855.870	98.84
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	91	96.24	105.76	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	188.123.581.792	183.835.142.488	97.72
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	41.512.088.258	35.357.022.827	85.17
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.004.294.822	1.960.466.380	97.81
							Program Pengelolaan Kecamatan	142.617.291.543	140.959.855.870	98.84
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	300.897.751.889	294.012.545.607	97.71
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	300.897.751.889	294.012.545.607	97.71
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	Persentase	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	300.897.751.889	294.012.545.607	97.71
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	Persentase	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	300.897.751.889	294.012.545.607	97.71
Sasaran Khusus										
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100	100	Program pengelolaan Kota Administrasi	51.659.000	17.990.000	34.82
							Program Penunjang Urusan	409.893.849	322.503.149	78.68

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pemerintahan Daerah Provinsi			
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Nilai	3	3	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	300.897.751.889	294.012.545.607	97.71
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai	81	81*	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
Sasaran Operasional										
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	99.99	99.99	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	93	90.66	97.48	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.277.551.038	6.122.581.724	73.97

Tabel 25. Program yang menunjang keberhasilan/ kegagalan capaian Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021

Penyerapan anggaran pada tabel di atas diperhitungkan berdasarkan penyerapan anggaran Program di mana kegiatan yang mendukung sasaran tersebut berada, atau diperhitungkan secara keseluruhan.

Beberapa program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pengelolaan Kecamatan, Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Kualitas penggunaan anggaran adalah seluruh program yang diampu Kota Administrasi Jakarta.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 29 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 66 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja pemanfaatan e-order adalah semua program dengan komponen makan minum rapat.

Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, indikator kinerja KSD 20, indikator kinerja KSD 73, indikator kinerja KSD 38, indikator kinerja KSD 39, indikator kinerja KSD 61, indikator kinerja KSD 63, indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah, indikator kinerja implementasi rencana strategis komunikasi publik, indikator kinerja Capaian predikat SAKIP, indikator kinerja tindak lanjut arahan Gubernur, indikator kinerja penyelesaian pengaduan masyarakat, indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM), indikator kinerja tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami APBD perubahan sehingga pagu anggaran awal, anggaran perubahan, dan realisasi program menjadi:

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	349,943,077,401	300,897,751,889	94,012,545,607	97.71%
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8,927,009,886	8,277,551,038	6,122,581,724	73.97%
3	Program Pengelolaan Kecamatan	144,250,578,462	142,617,291,543	40,959,855,870	98.84%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51,541,070,696	41,512,088,258	35,357,022,827	85.17%

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,077,018,692	2,004,294,822	1,960,466,380	97.81%
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190,271,555,947	188,123,581,792	183,835,142,488	97.72%
		747,010,311,084*	683,432,559,342*	662,247,614,896*	91.87%**

Tabel 26. Pagu anggaran awal, anggaran perubahan dan realisasi 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat

*= jumlah

**= rata-rata

Tabel analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	N/A	N/A	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	813.501.852	747635.000	91.9
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Indeks	86	91.63	106.55	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	813.501.852	747635.000	91.9
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	188.074.997.742	183.813.608.728	97.73
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan	5.975.179.008	5.761.181.400	96.42
								35.536.909.250	29.595.841.427	83.28	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kelurahan			
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	2.004.294.822	1.960.466.380	97.81
							Program Pengelolaan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	141.041.391.543	139.449.555.870	98.87
								Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	1.575.900.000	1.510.300.000	95.84
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	91	96.24	105.76	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi	7.261.999.264	5.227631.534	71.99
								Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi	54.323.522	41.220.190	75.88
								Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	961.228.252	853.730.000	88.82
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.584.050	21.533.760	44.32
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	188.074.997.742	183.813.608.728	97.73
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan	5.975.179.008	5.761.181.400	96.42
								Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.536.909.250	29.595.841.427	83.28
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	2.004.294.822	1.960.466.380	97.81
							Program Pengelolaan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan	1.575.900.000	1.510.300.000	95.84

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten			
								Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	141.041.391.543	139.449.555.870	98.87
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	249.200.381.336	248.961.273.773	99.90
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.702.794.782	2.306.170.489	85.33
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.065.117.666	18.553.691.080	92.47
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.399.800	390.086.400	99.66
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.518.777.648	23.782.125.565	83.39
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.280.657	19.198.300	99.57
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- ^a	-	-
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	Persentase	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- ^a	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)									
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	4.790.852	3.685.000	76.92
								Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	Persentase	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- ^a	-	-
Sasaran Khusus											
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	51.659.000	17.990.000	34.82

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang dan Jasa						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.087.233	311.394.149	78.82
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.806.616	11.109.000	75.02
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Nilai	3	3	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	81.463.000	80.500.000	98.82
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							Administrasi Umum Perangkat Daerah	- ^a	-	-	
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai	81	81 ^b	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	4.790.852	3.685.000	76.92
							Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-	
Sasaran Operasional											
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	99.99	99.99	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	93	90.66	97.48	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	648.000.000	648.000.000	100
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	- ^a	-	-

Tabel 27. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Keterangan:

a = Refocusing

b = Hasil evaluasi Inspektorat di atas 81

Besaran pagu dan realisasi kegiatan pada tabel di atas diambil berdasarkan nilai anggaran kegiatan terkait di mana di dalamnya terdapat sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja Walikota. Apabila sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kinerja mengalami refocusing, sementara masih ada sub kegiatan lain yang tidak mendukung secara langsung capaian kinerja tersebut, maka pagu dan realisasi tidak dimasukkan ke dalam tabel.

- Indikator Indeks Reformasi Birokrasi, pagu perubahan sebesar Rp. 813.501.852 dengan capaian 91,9%
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan), pagu perubahan Rp. 375.022.174.217 dengan rata-rata capaian 94,55%
- Indikator Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, pagu perubahan Rp. 683.432.559.342 dengan rata-rata capaian 91,87%
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Nomor 20, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD nomor 29, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Nomor 73, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Nomor 38, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Nomor 39, pagu perubahan sebesar Rp. 4.790.852 dengan capaian 76,92%
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Nomor 61, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Nomor 63, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Nomor 66, pagu refocusing, capaian anggaran N/A

- Indikator Persentase Pemanfaatan E-Order, pagu perubahan sebesar Rp. 461.552.849 dengan rata-rata capaian 62,88%
- Indikator Opini laporan keuangan daerah, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pagu perubahan sebesar Rp. 81.463.000 dengan capaian 98,82%
- Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021, pagu perubahan sebesar Rp. 4.790.852 dengan capaian 76,92%
- Indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat, pagu refocusing, capaian anggaran N/A
- Indikator Survei Kepuasan Masyarakat, pagu perubahan sebesar Rp. 648.000.000 dengan capaian 100%
- Indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), pagu refocusing, capaian anggaran N/A

PRESTASI

Setiap tahun Kota Administrasi Jakarta Pusat selalu mengikuti penilaian Kota/ Kabupaten Peduli HAM yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi untuk tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memutuskan untuk membatalkan penilaian Tahun 2021 melalui Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor HAM-HA.02.02-17 Tanggal 28 Juli 2021.

Beberapa penghargaan yang diperoleh di bawah koordinasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021, adalah:

No	Penghargaan	Keterangan
1	2	3
1	Harapan I Puteri	Lomba Genre Tahun 2021 Tingkat Provinsi DKI Jakarta
2	Harapan II Putera	
3	Juara Sosial Media Inspirator Putera	
4	Juara I Tiktok Kesehatan Reproduksi	
5	Kategori KLA Predikat Madya	Penilaian Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional
6	Juara III	Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi DKI Jakarta
7	Penghargaan Nominasi Badan Publik Kategori Pemerintahan Kota atau Kabupaten	Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
8	Adiwiyata <ul style="list-style-type: none"> • SMKN 14 • SMK Islam Said Naum • SDN Gondangdia 01 • SMP Kanisius Jakarta • SDN Mangga Dua Selatan 05 • SDN Kampung Rawa 02 	Tingkat Provinsi
9	Program Kampung Iklim <ul style="list-style-type: none"> • RW 01 Rawasari • RW 06 Johar Baru 	Tingkat Provinsi
10	Bidang Pengelolaan Sampah Terbaik <ul style="list-style-type: none"> • RW 03 Cempaka Putih Timur • RW 02 Rawasari • RW 01 Rawasari 	Tingkat Provinsi
11	Bank Sampah Terbaik Bank Sampah Perner RW 01	Tingkat Provinsi

No	Penghargaan	Keterangan
1	2	3
12	Adiwiyata <ul style="list-style-type: none"> • SMKN 38 • SMPN 273 	Tingkat Nasional

Tabel 28. Daftar Prestasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021



Gambar 9. Penerimaan Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2021



Gambar 10. Penerimaan Penghargaan MTQ Tahun 2021

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2021, disimpulkan bahwa:

1. Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi N/A karena proses penilaian belum selesai di akhir Tahun 2021;
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 di atas target, yaitu 91,63. Survey dilaksanakan untuk dua komponen pelayanan, yaitu PPSU dan Ketertiban Umum menggunakan form online;
3. Hasil kualitas penggunaan anggaran adalah 96,24%;
4. Hasil renaksi KSD 20, 29, 73, 38, 39, 61, 63, dan 66 mencapai target sebesar 100%;
5. Pemanfaatan e-Order masih mengalami kendala dengan adanya refocusing dan Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan pengecualian di Tahun 2021;
6. Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 adalah WTP/ 3, sesuai target;
7. Implementasi rencana strategis komunikasi publik Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target;
8. Predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 mencapai target berdasarkan evaluasi awal oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Penilaian tingkat nasional masih berproses;
9. Penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur Tahun 2021 memenuhi target;
10. Penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2021 sedikit di bawah target, yaitu 99,99%;
11. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKLM) tingkat Walikota di bawah target yaitu 90,66 dari target 93; dan
12. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK mencapai target di Tahun 2021.

SARAN

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, diharapkan:

1. Perbaiki berkesinambungan ke depan untuk Rencana Strategis sebagai persiapan mengikuti RPJMD 2023-2026;

2. Perbaikan-perbaikan pelayanan dari segi kompetensi petugas, sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat harus terus dievaluasi dan ditingkatkan;
3. Perekrutan petugas/kader ditingkatkan dengan penilaian kompetensi yang lebih baik;
4. Perbaikan kompetensi petugas survey dalam menyampaikan pertanyaan, mengingat format kuesioner sudah ditentukan dari provinsi (ada pernyataan dan persyaratan);
5. Sosialisasi kepada masyarakat yang menerima pelayanan, bahwa dalam memberikan pelayanan tidak terdapat persyaratan, prosedur serta biaya apapun, sehingga melalui sosialisasi masyarakat mengetahui terkait 3 (tiga) hal tersebut serta dapat membantu penilaian survei oleh masyarakat; dan
6. Peningkatan kinerja serta koordinasi antar pihak terkait untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun depan.

LAMPIRAN



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perlu dibentuk Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2021.**

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 dengan Susunan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat
 Nomor : 6-TP/PPW/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA
 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2021

Pengarah	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung jawab	: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua I	: Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua II	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua III	: Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	: Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
Anggota	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat 5. Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat 6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat 7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat 8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sekretariat	: Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


 DHANY SUKMA
 NIP 197403091993111001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHANY SUKMA
Jabatan : Walikota Jakarta Pusat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Walikota Jakarta Pusat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

DHANY SUKMA
NIP 187403091993111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Dhany Sukma
 NIP : 197403091993111001
 Jabatan : Walikota
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Pusat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tataaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86	86	Nilai



3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak diarahkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian Indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/LKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	e-Monev KSD	(Realisasi penyelesaian / target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko) x 100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Merah Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Merah Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
8	Meningkatnya kompetensi dan klm kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Khusus											
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan Ri mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP

11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfoitk menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfoitk.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	predikat
Sasaran Operasional											
13	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93	93	Nilai
16	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Walikota Jakarta Pusat

Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

FORM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2021

< PENDAHULUAN DEMOGRAFI RES >

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA TAHUN 2021

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 9 Indikator Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Terukurinya kepuasan pelayanan
2. Teridentifikasi keluhan masyarakat
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan di setiap unit pelayanan, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikannya
4. Data pendukung untuk mendorong unit pelayanan agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan
5. Data pendukung dalam penepatan kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik
6. Ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya

< ULUAN DEMOGRAFI RESPONDEN >

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA TAHUN 2021

Kelurahan *

pilihan : 

Pelayanan Yang diterima *

(Bisa Pilih lebih dari 1)

PPSU Kertertiban Umum

Profil Responden

Nama Responden *

 Write Here

Nomor HP Responden *

 Write Here

Jenis Kelamin Responden *

Laki-laki Perempuan

Usia Responden *

- <17 Tahun
- 17-25 Tahun
- 26-35 Tahun
- 36-45 Tahun
- 46-55 Tahun
- >55 Tahun

Pendidikan Terakhir Responden *

- Tidak Pernah Sekolah
- Taman Kanak-kanak (TK)/Setingkat
- SD/Setingkat
- SMP/Setingkat
- SMA/Setingkat
- Diploma D1/D2/D3/D4
- Sarjana S1
- Magister S2
- Doktor S3

Pekerjaan Responden *

- Pelajar/Mahasiswa
- PNS/Guru
- TNI
- POLRI
- Pegawai Swasta
- Wirausaha/Dagang/Bisnis/Freelance
- Tenaga Honorer
- Ibu Rumah Tangga
- Petugas PPSU
- Petugas Kertertiban Umum
- Pensiunan
- Ketua/Perangkat RT dan RW
- Pengelola RPTRA
- Kader/Pengurus Jumantik
- Tidak Bekerja
- Lainnya

KEMBALI

KIRIM

LANJUT 

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan atas pernyataan berikut ini:

1. Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

2. Prosedur mendapatkan pelayanan mudah: *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

3. Waktu penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

4. Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis? *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

5. Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

6. Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

7. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

8. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

9. Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik *

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat Tidak Setuju

Kritikan dan Saran *

Pilihan Maksimal 3

- Pertahankan kinerja pelayanan
- Tingkatkan kinerja pelayanan
- Monitor secara rutin untuk melihat kinerja petugas
- Diadakan pembinaan dan pelatihan secara berkala bagi petugas
- Petugas lebih sopan/ramah dalam melayani
- Fasilitas umum/petugas ditingkatkan
- Lebih diperhatikan kesejahteraan petugas
- Laporan/keluhan masyarakat cepat ditindaklanjuti
- Sosialisasi prosedur/pelayanan
- Mempermudah prosedur/pelayanan